



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);

e

10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada RKPD.
- (3) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA - SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja - PD Tahun Lalu.
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
 - BAB V : Penutup.
- (2) Rincian Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- c. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- d. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025;
- e. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025;

e

- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025;
- i. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025;
- l. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025;
- o. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025;
- t. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025;
- u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2025;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- x. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025;
- z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- bb. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025;
- cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025; dan
- dd. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025.

9

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 2 Agustus 2024

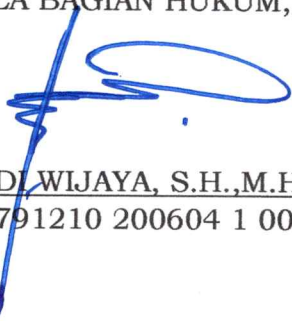
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

7. RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

Sebagai dokumen perencanaan, maka Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2025, Renstra Tahun 2021 - 2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, masalah yang dihadapi, usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat (Musrenbang), Pokok-pokok pikiran DPRD serta inovasi-inovasi OPD.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan; |
| BAB II | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sampai dengan tahun 2024. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, review terhadap rancangan awal RKPD 2025, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat; |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran, menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar; |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan, menguraikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perumusan |

program dan kegiatan, rekapitulasi dan penjelasan program dan kegiatan;

BAB V Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai darisuatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Kawasan Permukiman;
4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam pencapaian target kinerja dapat disajikan dalam penjelasan berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya akses rumah layak huni	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Peningkatan akses rumah layak huni	1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak 2. Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak di kawasan permukiman kumuh 3. Penyediaan rumah bagi korban relokasi program pemerintah 4. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana 5. Peningkatan pemberian rekomendasi pengembangan perumahan 6. Peningkatan ketersediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan memadai	1. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan permukiman
			2. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan perumahan
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas drainase	1. Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan permukiman
			2. Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan perumahan

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD
sampai dengan Tahun 2024
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
								K	Satuan								K
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
						Tujuan : Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,255	Indeks	0,248	0,251	0,251	100	0,251	0,251	98,43	
						Sasaran : Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	98,78	%	96,37	96,99	97,17	100,19	97,61	97,61	98,82	
1	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	100	100	
							Persentase tingkat hunian Rusunawa	95	%	95	95	95	100	95	95	100	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
								K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	0	0	2	.	0	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase data perumahan yang tersusun dan terupdate	90	%	70	75	75	100	80	80	100
1	0	0	2	.	0	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	2	Doku men	NA	NA	NA	NA	1	1	50
1	0	0	2	.	0	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	100	%	100	100	100	100	100	100	100
1	0	0	2	.	0	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Suka relawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota	400	Orang	100	100	100	100	50	250	62,5

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	0	0	2		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	100	%	NA	100	100	100	100	100	100
1	0	0	2	0	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	40	Unit	NA	10	0	-	6	6	15
1	0	0	2		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunawa	84,45	Indeks	87,90	80,57	86,26	107,06	80,77	86,26	102,14
1	0	0	2	0	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4	Doku men	NA	1	1	100	1	2	50
1	0	0			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	82,73	%	20	20,11	33,91	168,62	20,11	73,42	88,75
						Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	4,12	%	1,03	1,03	1,65	160,19	1,03	3,71	90,05
1	0	0	2		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan	100	%	NA	NA	NA	NA	48,61	48,61	48,61

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2					3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K	K
1	0	0	2	0	0	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	432	Unit	214	171	177	103,51	108	499	115,5
1	0	0				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	52,23	%	6,37	12,65	12,09	95,57	13,09	13,09	25,06
1	0	0	2	.	0	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	910	Unit	58	192	110	57,29	19	187	24,29
1	0	0	2	0	0	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	770	Unit	58	105	110	104,76	19	187	24,29
						Tujuan 2 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	85.64	%		74.47	76,56	102,81	78.19	78.19	91,3

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
					Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	89.89	%	76,83	73.94	77,13	104,31	79.26	79,26	88,17
1	0	0			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	72	%	78,01	67.52	78,09	115,65	69,15	78,09	108,46
						Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	75,66	%	75,66	66,27	76,17	114,94	69,4	76,17	100,67
1	0	0	2		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	32	Dokumen	8	4	4	100	5	17	53,13
1	0	0	2	0	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	8	Laporan	NA	2	2	100	2	4	50
1	0	0	2	0	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	12	Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	1	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	04	03	20012	00	Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	6	Kelompok	2	NA	NA	NA	2	4	66,67
1	04	03	2003		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	140.663	m	125663	67664	183969,3	146,39	130.663	183969,3	130,79
						Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	85.663	m	103547	67664	104245,4	154,06	73.663	104245,4	121,69
1	04	03	200034	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	16	Laporan	NA	2	2	100	4	6	37,5
1	04	03	200037	00	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	4	Dokumen	NA	1	1	100	1	2	50
1	04	03	200039	00	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	68	Ha	NA	4,8	8,54	177,92	4,5	13,04	19,18

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	
1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	70	%	74	64	86	134,375	66	86	122,86
						Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	70	%	74,16	64	87	135,94	66	87	124,29
1	0	0	2		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	21475	m	13698,90	15475	15922,63	102,89	17475	17475	81,37
						Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	24123	m	24071	21123	28134,82	133,19	22123	22123	91,71
1	0	0	2	0	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16	Lokasi	NA	9	9	100	4	13	81,25
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16	Laporan	NA	12	12	100	4	16	100
					Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A 84,57	Nilai	A (85,88)	A 84,51	A 86,30	102,12	A 86,30	A 86,30	102,05

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
					Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A 84,57	Nilai	A (85,88)	A 84,51	A 86,30	102,12	A 86,30	A 86,30	102,05
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,45	indeks	87,90	80,57	85,73	106,86	84,25	85,73	101,52
1	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
1	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Doku men	15	15	15	100	15	45	75
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	Lapora n	12	12	12	100	12	36	75
1	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	Orang /bula n	25	25	25	100	25	25	96,15

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
								K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	0	0	2	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	28	Lapora n	7	7	7	100	7	21	75
1	0	0	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
1	0	0	2	0		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	Paket	NA	2	2	100	2	4	50
1	0	0	2	0		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	Orang	NA	49	49	100	50	99	49,5
1	0	0	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
1	0	0	2	0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	NA	1	1	100	1	2	50
1	0	0	2	0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	NA	3	3	100	3	6	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	04	01	2006	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	Paket	NA	4	4	100	4	8	50
1	04	01	2006	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120	Paket	NA	30	31	103,3	30	61	50,83
1	04	01	2006	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	NA	1	1	100	1	2	50
1	04	01	2006	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	Laporan	40	40	46	115	40	126	78,75
1	04	01	2006	01	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20	Dokumen	NA	NA	NA	NA	5	5	25
1	04	01	2007		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	89	%	100	100	100	100	87	87	97,75
1	04	01	2007	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit	NA	2	2	100	2	4	36,36
1	04	01	2008		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
								K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132	Laporan	NA	26	24	92,31	24	48	36,36	
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1105	Laporan	NA	247	247	100	264	511	46,24	
1	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100	
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	10	10	10	100	10	10	100	
1	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	144	Unit	4	77	77	100	25	106	73,61	

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 realisasi program / kegiatan telah memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota, dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- Mekanisme kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja;
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar untuk mencapai target program dan kegiatan melalui perjanjian kinerja serta menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi;
- Adanya dukungan organisasi terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;
- Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Dari table hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024 maupun Renstra dapat dikatakan berhasil walaupun belum optimal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Terkait kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024 dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

No.	INDIKATOR	IKU/IKK/ SPM	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	masyarakat terdampak relokasi program pemerintah												
	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha di kabupaten/kota yang ditangani	IKK	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,176	8,26	4,354	16,9	16,9	
	Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH)	IKK	236	236	236	236	236	214	287	178	236	236	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	IKK	40.761	41.059	41.357	41.655	41.953	40550	3077	3077	41.655	41.953	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tidak dapat terlepas permasalahan dan hambatan. Permasalahan dan hambatan terkait kinerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah :

- a. Belum optimalnya akses masyarakat untuk memperoleh rumah layak huni
- b. Masih tingginya kawasan permukiman rawan kumuh
- c. Perubahan Tupoksi Dinas dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 50-5889 dimana kewenangan jalan lingkungan dan saluran drainase permukiman berpindah ke Dinas PUPR sehingga mempengaruhi pencapaian target indikator yang diampu dinas.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan di atas tentunya berdampak pada terhambatnya pencapaian visi misi kepala daerah. Oleh sebab itu perlu dicari solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan, program dan kegiatan yang tepat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

Selain permasalahan dan hambatan, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga dihadapkan pada tantangan dan peluang, diantaranya :

- a. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan akan rumah / perumahan semakin meningkat
- b. Kemungkinan munculnya kawasan permukiman kumuh baru sebagai imbas pertambahan penduduk

Dengan adanya masalah, hambatan, tantangan serta peluang yang dihadapi, telah memunculkan isu-isu penting yang strategis untuk segera ditindaklanjuti. Isu-isu strategis tersebut adalah belum tertatanya kawasan permukiman sehingga permukiman layak huni di Kota Blitar masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya prasarana umum (PSU) terutama jalan lingkungan dan saluran drainase pada kawasan kumuh dalam kondisi kurang baik dan masih adanya rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Blitar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Dalam tahap review terhadap rancangan awal RKPD, proses yang dilakukan adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses review ini dilakukan mengingat rancangan awal RKPD perlu disesuaikan dan diubah sesuai dengan kondisi, data dan kebutuhan saat ini. Dari hasil review tersebut terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, diantaranya terdapat rumusan kegiatan dan indikator kegiatan yang sebelumnya ada dalam rancangan awal RKPD karena adanya perubahan nomenklatur dan tupoksi Dinas dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan penataan jalan dan saluran drainase lingkungan serta perubahan nomenklatur sub kegiatan seperti sub kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh semula berada di Program Kawasan Permukiman pindah ke Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh selain itu juga ketersediaan

anggaran yang terbatas menyebabkan beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025. Beberapa kegiatan juga berbeda dari rancangan awal RKPD terkait besaran nominal kegiatan, dan juga perubahan nomenklatur dan penambahan tupoksi Dinas yaitu penataan pemakaman umum di Kota Blitar serta proses pengajuan pembangunan Rusunawa yang membutuhkan anggaran untuk analisis dampak lingkungan dan juga ketersediaan anggaran menyebabkan perubahan yang sangat signifikan dalam analisis kebutuhan tahun 2025.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kota Blitar

Nama PD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			12.347.973.855		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			12.747.973.855		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100 %	874.458.679	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100 %	1.540.907.980	
			Persentase tingkat hunian Rusunawa	95 %				Persentase tingkat hunian Rusunawa	95 %		
1.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	80 %	61.974.800	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	80 %	630.458.500	Penambahan Amdal Rusunawa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	2 Dokumen	535.500.000	Amdal Rusunawa
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	61.974.800	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	5.005.000	
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terverifikasi	1 Dokumen		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terverifikasi	1 Dokumen	89.953.500	
1.2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	100 %	21.865.000	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	100 %	45.626.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kota Blitar	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	21.865.000	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kota Blitar	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	60 Orang	30.113.000	
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kota Blitar	Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih	40 Orang	-	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kota Blitar	Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih	40 Orang	15.513.000	
1.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	100 %	74.707.350	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	100 %	118.916.900	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Blitar	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 Unit Rumah	74.707.350	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Blitar	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 Unit Rumah	83.916.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit	'	Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit	35.000.000	
1.4	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		IKM Pengelolaan Rusunawa	80,77 Indeks	715.911.529	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		IKM Pengelolaan Rusunawa	B 86,26 Indeks	745.906.580	
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2 Laporan	'	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2 Laporan	79.996.000	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	715.911.529	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	665.910.580	
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	69,15 %	2.008.152.100	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	78,09 %	3.062.237.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	69,40 %				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	76,17 %		
			Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	13,09 %				Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	2,2 %		
2.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	5 Dokumen	85.000.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	2 Dokumen	174.818.700	
	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisisasi	1 Dokumen	75.000.000	Penyusunan/Review /Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisisasi	1 Dokumen	164.864.200	
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	2 Kelompok Masyarakat	10.000.000	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	2 Kelompok Masyarakat	9.954.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	276 unit	1.923.152.100	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	207 unit	2.887.418.900	
			Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	73.663 m				Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	10424 5,4 m		
			Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	130.663 m				Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	18396 9,3 m		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 unit	426.305.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 unit	375.487.600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4 Laporan	421.839.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	1.871.961.300	penataan dan pengelolaan areal pemukiman umum

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	25.000.000	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	32.445.000	
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	4,5 Ha	1.050.007.600	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	4,5 Ha	607.525.000	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	20,11 %	3.088.478.800	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	20,11 %	1.888.262.100	
			Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1,03 %				Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1,03 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan</i>	95 %	3.088.478.800	<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan</i>	72,92 %	1.888.262.100	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	108 unit	3.058.478.800	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100 unit	1.854.012.100	
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100 Orang	30.000.000	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100 Orang	34.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	66 %	1.245.195.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	86 %	887.046.400	
			Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	66 %				Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	87 %		
4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	17475 m	1.245.195.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	15922 m	887.046.400	
			Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	22123 m				Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	28134 m		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Blitar	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4 Lokasi	1.240.425.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Blitar	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	879.824.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 Laporan	4.770.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4 Laporan	7.221.600	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,25 Indeks	5.097.591.171	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,73 Indeks	5.369.519.775	
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	43.145.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	10.031.100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	28.375.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	6.611.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	14.769.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3.420.100	
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.425.254.318	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.503.281.361	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang /bulan	3.422.204.318	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang /bulan	3.501.006.361	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	7 Laporan	3.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	7 Laporan	2.275.000	
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	108.546.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	133.074.400	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	69.755.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	86.490.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	38.791.800	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	46.584.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	342.343.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	349.691.350	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.689.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.909.900	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	21.709.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.469.400	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	13.289.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.385.400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	49.025.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	55.850.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.582.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.926.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	199.923.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	220.407.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	30.125.700	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	19.743.650	
5.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	88 %	26.356.098	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	88 %	114.416.300	
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	-	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	11.571.800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	26.356.098	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	102.844.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	100 %	849.965.755	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	100 %	884.395.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	73.182.055	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	76.488.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	264 Laporan	776.783.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	286 Laporan	807.907.800	
5.7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	100 %	301.979.500	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	100 %	374.629.464	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	141.773.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	146.610.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	30.085.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	40.654.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	46.840.700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	169.830.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	83.280.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.535.464	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Blitar

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Bapak Slamet Jl. Sirsat No. 54 RT 01 RW 01 Karang Sari Kota Blitar, Kota Blitar 2. Sri Utami Jl. Jambu No. 54 RT 03 RW 02 Kel. Karang Sari Kota Blitar, Kota Blitar 3. BUDIMAN JL. JAMBU NO. 38 RT 03 RW 02 KEL. KARANGSARI KOTA BLITAR 4. MARYANTO JL. KALIDERES NO. 29 RT 01 RW 009 KEL. KAUMAN KOTA BLITAR 5. AGNES TEA PRATIWI JL. KOL. SUGIONO, RT 01 RW 02 KEL. GEDOG, KEC. SANANWETAN KOTA BLITAR 6. HERU IRAWAN JL. KETAPANG GG. VI NO. 11, RT 02 RW 01 KEL. TLUMPU KOTA BLITAR,	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	16 Unit	

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
			7. DARTIYAH jl. jambe no. 29 RT 01 RW 01 KEL. TLUMPU			
			8. AKHMAD FARIZ ALFARIZI JL. BENGAWAN SOLO GG. III NO. 6 RT 03 RW 03 KEL. PAKUNDEN			
			9. FATOYAH JL. BENGAWAN SOLO GG. V NO. 11 RT 003 RW 003 KEL. PAKUNDEN			
			10.MASITAH JL. KETAPANG RT 02 RW 01 KEL. TLUMPU			
			11.Sukaji jl. Bengawan Solo RT 03 RW 05 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo			
			12.Mujari Jl. Kasan Sobari No.34 RT 3 RW 12 Kel. Gedog Kec. Sananwetan, Kota Blitar			
			13.Meselan Jl. Brigjen Katamso No.191 RT.2 RW.11 Kel. Gedog Kec. Sananwetan, Kota Blitar			
			14.Surib : RT 03 Rw 05 Jl.Sulawesi, Cabean, Plosokerep			
			15.Marsitun : RT 03 Rw 05 Jl.Sulawesi, Cabean, Plosokerep			
			16.Ali Rosyidi : RT 02 Rw 05 Jl.kenari no			

No	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
			149, Cabean, Plosokerep, Kota Blitar			
2	Pengaspala n jalan P = 800 m L = 5 m	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Perum. Kenari Asri Blok R dan S Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan, Kota Blitar	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4000 m	
3	Pembangu nan pagar pemakama n umum P=75m T=2m	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	RT.2 RW.6 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	150 m2	
4	PEMBUAT AN SALURAN AIR P= 250 L= 0.8 M T= 0.6 M (CP: PAK SUKAR 085891811 356)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Jalan Duku RT 2/1, Kel Karangsari, Kec. Sukorejo, Kota Blitar	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	120 m	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018, arah kebijakan pembangunan daerah dalam bidang perumahan rakyat di daerah adalah :

- (a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- (b) fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan pernyataan kebijakan di atas maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dan sesuai dengan Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- (1) penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- (2) penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targetting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
- (3) fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- (4) kemudahan perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017);
- (5) mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- (6) pengentasan permukiman kumuh dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- (7) menyusun rencana penyediaan hunian layak atau Dokumen RP3KP;
- (8) mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan fasilitas umum dasar dalam rangka penanganan permukiman kumuh; dan
- (9) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional dalam penerapan SPM perumahan rakyat dan mencapai tujuan bidang perumahan rakyat yaitu mempercepat pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar maka arah kebijakan pembangunan yang di perhatikan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- (2) fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Peraturan Pemerintah Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

Dalam hal pencapaian pembangunan bidang perumahan dan pencapaian tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan PSU yang memadai, arah kebijakan pembangunan daerah yang perlu di perhatikan adalah sebagai berikut:

- (1) infrastruktur dasar dan konektivitas; kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni;
- (2) pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk berpendapatan rendah); akses sanitasi layak pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk berpendapatan rendah); penyelenggaraan sinergi sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat;
- (3) terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga;
- (4) terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga; penyediaan rumah susun sewa untuk 550.000 rumah tangga; penyediaan KPR swadaya untuk 450.000 rumah tagga;
- (5) terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga; bantuan stimulant pembangunan baru rumah swadaya untuk 250.000 rumah tangga;
- (6) pembangunan rumah khusus di daerah perbatasan, pasca bencana dan pasca konflik untuk 50.000 rumah tangga;
- (7) mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak untuk 2,2 juta rumah tangga untuk mendukung penurunan angka kekurangan rumah;
- (8) peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk 1,5 juta rumah tangga, termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh; dan
- (9) tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran dimaksud dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 -2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
1	Tujuan 1 : Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio Rumah layak huni adalah perbandingan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya terhadap jumlah penduduk.	0,250	0,251	0,251	0,253	0,255
	Sasaran 1 : Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Persentase Rumah layak huni adalah persentase jumlah rumah layak huni yang sesuai dengan standar kelayak hunian terhadap jumlah keseluruhan rumah	96,99	98,13	97,61	98,23	98,79
2	Tujuan 2 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi dengan PSU yang layak merupakan perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi dengan kelengkapan dasar dan kelengkapan penunjang fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman	74,47	76,56	78,19	81,91	85,64
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dengan kondisi baik yang memenuhi standart teknis jalan dan drainase sehingga dapat menunjang lingkungan hunian yang layak	73,94	77,13	79,26	84,57	89,89

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
3	Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajamen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.	A 84.51	A 86,30	A 86,30	A 86,30	A 86,30
	Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajamen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi	A 84.51	A 86,30	A 86,30	A 86,30	A 86,30

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025 dapat disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.3
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Mendukung pencapaian SPM atau IKK
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
1	04	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
1	04	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1	04	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
1	04	01	2.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan</i>	
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
1	04	01	2.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
						Air dan Listrik yang Disediakan	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1	04	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	Mendukung Pencapaian SPM, IKK
						Persentase tingkat hunian Rusunawa	
1	04	02	2.01		<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate</i>	
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	
1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	
1	04	02	2.01	00010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terverifikasi	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	04	02	2. 02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	
1	04	02	2. 02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelaw an Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1	04	02	2. 02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih	
1	04	02	2. 03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	
1	04	02	2. 03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	
1	04	02	2. 03	0009	Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1	04	02	2. 05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunaawa	
1	04	02	2. 05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
1	04	02	2. 05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	Mendukung pencapaian IKK, Tupoksi, Tematik Kemiskinan
						Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	
						Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	
1	04	03	2. 02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	
1	04	03	2.03		<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya</i>	
						<i>Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik</i>	
						<i>Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik</i>	
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	Mendukung pencapaian IKK, Tupoksi, Tematik Kemiskinan
						Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	
1	04	04	2.01		<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan</i>	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	Mendukung pencapaian IKK, Tupoksi
						Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	
						Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan yang berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi”, dijabarkan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut.

1. Prioritas Daerah 1:
Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan
2. Prioritas Daerah 2:
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital Dan Investasi
3. Prioritas Daerah 3:
Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dan SDM Yang Berdaya Saing
4. Prioritas Daerah 4:
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup
5. Prioritas Daerah 5:
Penguatan Ekonomi Kreatif Dan Peningkatan Ekonomi Digital
6. Prioritas Daerah 6:
Pemantapan Kota Blitar Sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Kebudayaan.

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar mendukung prioritas pembangunan 1 yaitu Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dan prioritas pembangunan 4 yaitu Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berperan dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi monitoring dalam pencapaian target – target pembangunan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Blitar 2021 - 2026, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas Perangkat Daerah	Program
Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan	Blitar Melayani	Penanggulan gan Kemiskinan	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni, Pembangunan Rumah Swadaya,	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Kawasan Permukiman
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	Blitar Membangun dan Kondusif	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Pencapaian SPM	Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan PSU

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 4.2

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

pada Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKi IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan Rumah Layak Huni sesuai Standar	- Melaksanakan Verifikasi dan updating data serta penguatan regulasi terkait standar rumah layak huni serta klasifikasi penerima program - Melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam keswadayaan peningkatan kualitas rumah dan Penguatan proses verifikasi penerima program	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2	Meningkatkan kualitas sarana prasarana di	Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan	Program Kawasan Permukiman

No	Langkah Perbaikan LKi IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	perumahan dan kawasan permukiman	jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
3	Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	- o Melakukan review target kinerja dalam perubahan renstra - o Hasil capaian kinerja dinas disampaikan telah ke seluruh pegawai dalam rapat koordinasi realisasi capaian kinerja dan apel pagi - o Setiap hasil monev yang dilakukan telah teridentifikasi hambatan - hambatan dalam pencapaian kinerja , dan sudah digunakan untuk menentukan strategi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Untuk mencapai visi misi kepala daerah dan tujuan serta sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka perlu dijabarkan melalui program dan kegiatan teknis yang berisi indikator kinerja, target serta pendanaan. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM serta pendayagunaan potensi yang ada di daerah.

Pada tahun 2025 jumlah program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sejumlah 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 40 (empatpuluh) sub kegiatan. Lokasi program dan kegiatan adalah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan di Kota Blitar. Untuk dana/pagu indikatif bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif Fiskal.

Untuk rumusan program dan kegiatan tahun 2025 secara rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel. 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Blitar
Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Blitar

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				12.747.973.855				17.162.914.181,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.747.973.855				17.162.914.181,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				12.747.973.855				17.162.914.181,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	Kota Blitar	100 %	1.540.907.980			100 %	1.321.300.217
		Persentase tingkat hunian Rusunawa		95 %				95 %	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.02.2.01	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate</i>		85 %	630.458.500			90 %	247.255.500
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		2 Dok	535.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dok	141.750.000
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		1 Dok	5,005,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dok	5.505.500
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		1 Dok	89.953.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dok	100.000.000
1.04.02.2.02	<i>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi</i>		100 %	45.626.000			100 %	47.907.300

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		60 orang	30.113.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		60 orang	31.618.650
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		40 Orang	15.513.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		40 Orang	16.288.650
1.04.02.2.03	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota</i>		100 %	118.916.900			100 %	158.634.735
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		6 Unit rumah	83.916.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		6 Unit rumah	108.634.735
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Unit	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Unit	50.000.000
1.04.02.2.05	<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>	<i>IKM Pengelolaan Rusunawa</i>		<i>B</i> 86,26 <i>Indeks</i>	745.906.580			<i>B</i> 86,26 <i>Indeks</i>	867.502.682

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		2 Laporan	79.996.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	80.000.000
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1 Dokumen	665.910.580	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	787.502.682
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman		76,17 %	3.062.237.600,00			76,17 %	5.427.817.275
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman		78,09 %				78,09 %	
		Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh		2,2 %				2,2 %	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan data base permukiman yang tersusun		2 Dokumen	174.818.700			2 Dokumen	184.107.500
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi		1 Dokumen	164.864.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	173.107.500

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.03. 2.02. 0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina		2 Kelompok	9.954.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Hasil Pemutakhiran Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	2 Kelompok	11.000.000
1.04.03. 2.03	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya</i>		207 unit	2.887.418.900			227 unit	5.243.709.775
		<i>Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik</i>		104245,4 m				104245,4 m	
		<i>Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik</i>		183969,3 m				183969,3 m	
1.04.03. 2.03. 0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		20 Unit Rumah	375.487.600	Insentif Fiskal		193 Unit Rumah	3.538.687.635
1.04.03. 2.03. 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		2 Laporan	1.871.961.300,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	464.023.450
1.04.03. 2.03. 0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		1 Dokumen	32.445.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	34.067.250

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.03. 2.03. 0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan		4.5 Ha	607.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Hasil Pemutakhiran Kepmendagri 050- 5889	8 Ha	1.206.931.440,
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		1.03 %	1.888.262.100			1.03 %	3.400.289.180
		Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh		20.11 %				20.11 %	
1.04.04. 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan		72,92 %	1.888.262.100			95 %	3.400.289.180
1.04.04. 2.01. 0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		100 Unit Rumah	1.854.012.100	Insentif Fiskal		105 Unit Rumah	3.364.326.680

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.04. 2.01. 0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		100 Orang	34.250.000		Hasil Pemutakhiran Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	100 Orang	35.962.500
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan		86 %	887.046.400			86 %	1.540.467.500
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan		87 %				87 %	
1.04.05. 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik		15922 m	887.046.400			15922 m	1.540.467.500
		Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik		28134 m				28134 m	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.05. 2.01. 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		3 Lokasi	879.824.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Lokasi	1.529.467.500,
1.04.05. 2.01. 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		4 Laporan	7.221.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Laporan	11.000.000
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)		B 85,73 Indeks	5.504.519.775			B 85,73 Indeks	5.473.040.009,
1.04.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	10.031.100			100 %	28.446.450
1.04.01. 2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15 Dokumen	6,611,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		15 Dokumen	12.200.000
1.04.01. 2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	3.420.100	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Laporan	16.246.450

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	3.638.281.361			100 %	3.596.669.534
1.04.01. 2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		24 Orang/ bulan	3.636.006.361,	Dana Alokasi Umum		24 Orang/ bulan	3.593.314.534
1.04.01. 2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD		7 Laporan	2.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7 Laporan	3.355.000
1.04.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	133.074.400			100 %	121.401.480
1.04.01. 2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	86.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Paket	76.730.500
1.04.01. 2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		50 Orang	46.584.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		50 Orang	44.670.980

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	349.691.350			100 %	384.565.420
1.04.01. 2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4,909,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	9.558.000
1.04.01. 2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	20.469.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Paket	23.880.120
1.04.01. 2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	10.385.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Paket	14.618.200
1.04.01. 2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		30 Paket	55.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		30 Paket	53.927.500
1.04.01. 2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	17.926.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Paket	21.540.600
1.04.01. 2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	220.407.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		40 Laporan	230.915.300

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01. 2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		5 Doku men	19,743,650	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5 Doku men	30.125.700
1.04.01. 2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan</i>		88 %	114.416.300			89 %	88.491.700
1.04.01. 2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit	11.571.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Unit	17.500.000,
1.04.01. 2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		8 Unit	102.844.500,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Unit	70.991.700
1.04.01. 2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>		100 %	884.395.800			100 %	976.123.085
1.04.01. 2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Lapo ran	76.488.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		36 Lapo ran	80.500.200
1.04.01. 2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		286 Lapo ran	807.907.800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		286 Lapo ran	895.622.885

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	374.629.464			100 %	277.342.340
1.04.01. 2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	146.610.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		11 Unit	148.862.100
1.04.01. 2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	40.654.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		25 Unit	42.686.700
1.04.01. 2.09. 0009	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	169.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Unit	49.185.100
1.04.01. 2.09. 0011	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas		1 Unit	17.535.464	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 Unit	36.608.440
JUMLAH					12,747,973,855				17.162.914.181

Dengan fokus pada :

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar diantaranya :

1. Masih terdapatnya infrastruktur permukiman yang kondisinya kurang baik sehingga rawan menimbulkan permukiman kumuh terutama di kawasan padat penduduk, hal ini dikarenakan perkembangan persoalan penataan kawasan permukiman sehingga diterbitkan Keputusan Walikota Blitar nomor 188/338/HK/410.010.2/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Blitar.
2. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Blitar baik di dalam permukiman kumuh maupun di luar permukiman kumuh
3. Kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk memiliki rumah sendiri khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Dalam menghadapi permasalahan di atas, terdapat beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan yaitu:

1. Perlu adanya upaya pengurangan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman berupa perbaikan infrastruktur permukiman, peningkatan kesadaran warga masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta kolaborasi program kegiatan yang bersumber dari anggaran pusat, provinsi dan daerah serta swadaya masyarakat dan swasta.
2. Menangani percepatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui dana APBN dengan menerapkan konsep skema peningkatan keswadayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sedang yang melalui APBD melalui Bansos Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh dan di Luar kawasan Kumuh dengan konsep skema yang sama dengan dana dari pemerintah pusat yaitu peningkatan keswadayaan masyarakat.
3. Memfasilitasi penyediaan rumah bagi MBR melalui pengajuan usulan pembangunan baru rumah swadaya baik melalui APBD maupun APBN, usulan pembangunan Rusunawa dan mendukung partisipasi masyarakat untuk berswadaya memiliki rumah.

Selain itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar juga menyusun manajemen resiko untuk mengawal pencapaian target yang telah direncanakan, dari hasil penyusunan didapatkan bahwa resiko tertinggi yang harus dihadapi adalah MBR yang mengundurkan diri dari Program karena kurangnya kemampuan swadaya masyarakat dan MBR merasa tidak mampu melanjutkan pembangunan rumah. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilaksanakan sosialisasi sebelumnya dan juga menggali kembali kebiasaan gotong royong di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025.

Rencana Kerja tahun 2025 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

a) Catatan Penting

Penyusunan Renja tahun 2025 terpengaruh oleh terbitnya :

- ✓ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, dimana kewenangan penataan jalan lingkungan dan saluran drainase dipindahkan ke Dinas PUPR sehingga mempengaruhi pencapaian target indikator utama;
- ✓ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga ada sub kegiatan yang mengalami perubahan nomenklatur yaitu Sub kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh semula di Program Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun berubah menjadi di program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh;
- ✓ Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65 dimana Penataan dan Pemeliharaan Pemakaman menjadi tanggungjawab dan wewenang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

Dalam Rencana Kerja tahun 2025 terdapat beberapa sub kegiatan tercantum dalam Renstra Dinas tetapi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

b) Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran,

2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaannya,
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

c) Rencana Tindak Lanjut

Dalam pencapaian kinerja maka akan diupayakan hal – hal sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah maupun lembaga lainnya untuk pencapaian target indicator kinerja;
2. Mengupayakan sumber anggaran di luar APBD Kota Blitar seperti DAK, BSPS, CSR, Swadaya Masyarakat dan lain-lain.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.